



#4

Proses Registrasi Sosial Ekonomi di Mempawah, Kalimantan Barat

Eliana Sidipurwanty & Yumantoko

A. Mendata di antara Aliran Sungai

Salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat adalah Mempawah. Kabupaten ini sebelumnya bernama Pontianak dan berubah menjadi Kabupaten Mempawah sejak tahun 2014. Di lokasi observasi ini, tim bertemu dengan berbagai etnis dominan, seperti Dayak, Melayu, Jawa, Tionghoa, dan Madura. Keragaman ini membuat kekayaan sosial, ekonomi, dan budaya di sana semakin beragam. Dari observasi singkat di sana terlihat bahwa mayoritas etnis Melayu dan Dayak dominan berprofesi sebagai nelayan dan petani. Etnis Tionghoa dengan kepiawaiannya dalam bidang perdagangan dan industri. Tidak ketinggalan etnis Jawa yang terlibat dalam perdagangan dan etnis Madura yang lebih banyak terlibat dalam sektor pertanian semuanya memberikan warna unik dalam kehidupan masyarakat Mempawah.

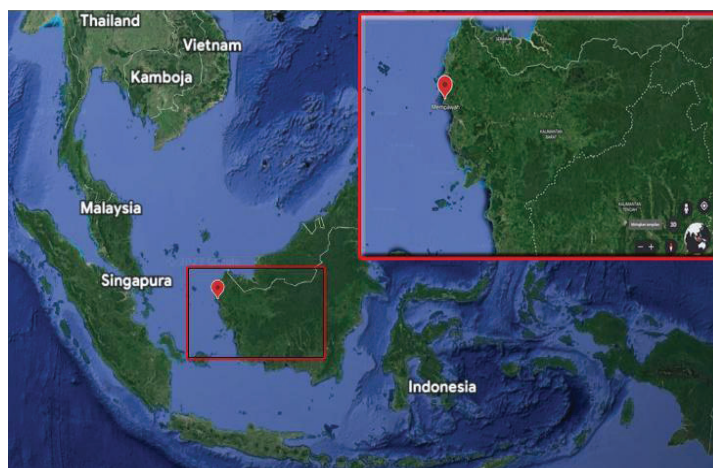
E. Sidipurwanty,* & Yumantoko

*Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: elia001@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional

Sidipurwanty, E., & Yumantoko. (2023). Proses registrasi sosial ekonomi di Mempawah, Kalimantan Barat. Dalam Humaedi, M. A., Imron, D. K. & Pramono, A. (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Seri 2: Indonesia Tengah-Barat* (93–126). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.777.c706 ISBN: 978-623-8052-95-0 E-ISBN: 978-623-8052-99-8

Regsosek merupakan kegiatan untuk mencatat kondisi sosial ekonomi di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Mempawah sendiri kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan wilayah setempat. Meskipun statistik menunjukkan bahwa Mempawah bukan kabupaten yang tertinggal dibandingkan kabupaten lainnya di Kalimantan Barat, tetapi masih ada perbedaan data kemiskinan dari kementerian/lembaga terkait yang digunakan untuk bantuan sosial sehingga menyebabkan ketidakakuratan data yang sering kali tidak tepat sasaran ketika digunakan sebagai dasar pemberian bantuan. Presiden menginginkan adanya satu data yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan bantuan sosial agar pengentasan kemiskinan dapat tuntas pada tahun 2024. Oleh karena itu, Regsosek diharapkan dapat menghilangkan duplikasi data di kementerian/lembaga dan membangun satu basis data baru yang dapat digunakan bersama. Hal ini juga berlaku untuk Kabupaten Mempawah dimana terdapat perbedaan data kesejahteraan antara desa dengan instansi tingkat kabupaten hingga pusat sehingga banyak desa di Mempawah kebingungan ketika bantuan masa pandemi.



Sumber: Google (t.t.)

Gambar 4.1 Posisi Kabupaten Mempawah

Kalimantan Barat melaksanakan Regsosek di 12 kabupaten dan dua kota termasuk Kabupaten Mempawah. Menceritakan Regsosek di Kabupaten Mempawah sangat menarik karena kabupaten ini memiliki kekhasan geografis sebagai wilayah pesisir di Kalimantan yang selalu diidentikkan dengan muara-muara sungai besar, serta ekosistem pesisir yang kaya akan keragaman sosial budaya masyarakatnya. Jika dihubungkan dengan kekayaan sosial ekonomi budaya dalam konteks lokal akan menjadi pembahasan yang memiliki nilai kekhasan tersendiri. Selain itu, berdasarkan kekhususan daerah observasi merupakan salah satu kabupaten rawan miskin akibat perubahan lingkungan.

Namun, pelaksanaan Regsosek di lapangan tidak selalu berjalan lancar karena hambatan-hambatan yang menyertainya. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Regsosek di Kalimantan Barat dapat berasal dari faktor alam dan manusia. Faktor alam terkait dengan aspek geografis, meliputi jangkauan yang luas pada daerah-daerah, sungai-sungai yang terkenal besar, adanya pulau-pulau terluar, daerah pedalaman, daerah perkebunan, wilayah pesisir, dan wilayah rawa. Terkadang banjir karena pelaksanaan pada musim penghujan (15 Oktober sampai 14 November) sehingga menyulitkan petugas untuk mendata. Pada saat itu juga, ada masyarakat yang didata terkena musibah bahkan ada yang sampai mengungsi. Faktor manusia, meliputi masyarakat yang akan didata sulit ditemui, PPL yang datang ditolak atau tidak mau ditemui sama sekali karena sibuk, tuan rumah acuh atau tidak berada di rumah karena jam kerja. Namun, dengan dukungan penuh dari berbagai pihak serta kerja sama yang baik dengan masyarakat setempat, petugas Regsosek dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan melaksanakan kegiatan pendataan dengan sukses.

Melalui buku ini pembaca akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana proses Regsosek berlangsung dan diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan wilayah Kabupaten Mempawah serta dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Tulisan ini memaparkan kegiatan Regsosek di Kabupaten Mempawah

secara khusus dan Kalimantan Barat secara umum mulai dari kondisi lokasi observasi, proses bisnis Regsosek, dukungan para pihak, serta nilai positif yang diperoleh dari pendataan baik oleh petugas maupun masyarakat setempat.

Data dalam buku ini diperoleh melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat Regsosek, seperti Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Kepala BPS Kabupaten Mempawah, staf di BPS Provinsi Kalimantan Barat dan BPS Kabupaten Mempawah, petugas lapangan, kepala desa serta perangkatnya, dan masyarakat. Selain itu tulisan ini juga menggunakan data sekunder berupa data yang telah dikumpulkan oleh BPS Provinsi Kalimantan Barat dan BPS Kabupaten Mempawah. Selain itu dalam tulisan ini juga menampilkan beberapa gambar yang dapat mewakili proses Regsosek di Kabupaten Mempawah. Foto yang dipublikasikan sudah mendapatkan persetujuan dari pihak pihak terkait.

Banyak pihak telah membantu dalam penyusunan tulisan ini, antara lain BPS Provinsi Kalimantan Barat dan BPS Kabupaten Mempawah yang telah memfasilitasi kebutuhan penulis selama



Foto: Yumantoko (2022)

Gambar 4.2 Diskusi dengan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat

dilapangan. Untuk itu kami ingin mengucapkan terima kasih untuk kerja samanya semoga penulisan ini dapat bermanfaat untuk banyak pihak.

B. Bentang Alam Tersulit

Kondisi lingkungan memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Apabila lingkungan dalam kondisi baik maka makhluk hidup di sekitarnya akan memperoleh manfaat yang beraneka ragam. Namun, ketika lingkungan rusak, kehidupan manusia menjadi terancam. Kajian pada bab ini menggambarkan kondisi alam Kalimantan Barat secara umum dan memberi contoh secara khusus sebuah desa di Mempawah yang penduduknya terdampak akibat kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan kemudian menjadi ancaman (*threat*) nyata untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat berada di posisi rentan dengan adanya kerusakan lingkungan.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki kondisi geografis yang beragam. Wilayah Timur berbatasan dengan provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Wilayah Barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata. Wilayah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kalimantan Tengah, dan wilayah Utara berbatasan dengan Serawak, Malaysia. Wilayah provinsi ini membentang sepanjang 600 km dari Utara ke Selatan dan 850 km dari Barat ke Timur. Provinsi Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik di daratan dan lautan. Di darat terdapat kawasan hutan yang luasnya mencapai 8.389.600 ha atau 57,14 % dari luas provinsi, yaitu 14.680.790 ha. Potensi yang besar tersebut menjadi kesempatan dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hutan sangat penting bagi ekosistem secara keseluruhan di suatu wilayah. Kerusakan akibat kebakaran hutan dan penebangan lahan menjadi ancaman bagi lingkungan dan masyarakat. Anugerah lain dari Provinsi Kalimantan Barat, yaitu keberadaan sungai dan danau. Sungai besar yang terkenal, antara lain Kapuas (1.086 km),

Melawi (471 km), Pawan (197 km), Kedawangan (128 km), Jelai (135 km), Sekadau (117 km), Sambas (233 km), Landak (178 km). Transportasi pada zaman dahulu menjadikan sungai sebagai andalan akses mencapai daerah lain. Bentang alam lainnya, yaitu danau. Danau yang terkenal ialah Sentarum dengan luas 117.500 hektar (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, t.t.).

Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat dapat diamati dari komoditas yang dihasilkan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Komoditas tersebut diantaranya kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, kopi, dan sebagainya. Berdasarkan data dari BPS, komoditas tersebut juga menyumbang PDB regional yang besar bagi perekonomian Kalbar. Usaha komoditas terdiri dari usaha besar dan individu. Usaha besar diartikan sebagai usaha yang dikelola oleh perusahaan atau memiliki skala usaha besar. Usaha besar umumnya mengelola komoditas kelapa sawit. Usaha perkebunan yang dikelola rakyat, antara lain kelapa sawit, kelapa, kopi kakao, dan karet.

Selanjutnya, sektor perikanan. Sektor ini memberi hasil yang besar dari perikanan tangkap dan budi daya. Usaha perikanan budi daya biasanya dalam bentuk tambak dan hanya dilakukan oleh pemodal menengah hingga besar. Sedangkan masyarakat secara umum banyak terlibat pada usaha perikanan tangkap sebagai nelayan. Hasil yang didapatkan dari berbagai macam komoditas menjadikan warga enggan untuk merantau. Hal ini sesuai dengan pengakuan perangkat desa di Desa Sungai Bakau Besar Laut yang warganya lebih banyak berusaha di daerahnya dalam mencukupi kebutuhan hidup. Ketergantungan masyarakat ini harus menjadi perhatian agar mereka terus eksis dengan sumber daya alam disekitarnya dan kelestariannya terus terjaga. Kerusakan lingkungan terjadi akibat pemanfaatan sumber daya yang tidak sesuai dengan kaidah akan merugikan masyarakat itu sendiri. Desa Sungai Bakau Besar Laut menjadi contoh bagaimana kondisi lingkungan berdampak kepada masyarakat.

Penduduk Desa Sungai Bakau Besar Laut banyak berprofesi sebagai nelayan dan petani. Para nelayan mencari ikan ke Laut Natuna yang berbatasan dengan desa. Kapal yang digunakan sebagian besar



Keterangan: A: Permukiman, B: Lahan Pertanian, C: Tambak Ikan/Udang, D: Bakau
 Sumber: Google (t.t.)

Gambar 4.3 Peta Desa Sungai Bakau Besar Laut

berukuran kecil dengan daya angkut maksimal tiga orang. Dengan kondisi tersebut, nelayan hanya mencari ikan di sekitar desa. Potret penduduk selanjutnya ialah penduduk yang mengolah lahan pertanian. Salah seorang perangkat desa mengatakan bahwa dahulu hasil panen dapat mencapai tujuh ton per hektar. Namun, saat ini mendapat dua ton sudah sangat disyukuri warga. Perubahan hasil panen sangat signifikan dan mempengaruhi pendapatan petani lebih dari setengahnya. Ada hal mengapa hasil lahan pertanian terutama padi bisa turun drastis. Perangkat Desa Sungai Bakau Besar Laut menjelaskan bahwa saat ini lahan pertanian sering terendam air pasang laut. Perangkat tersebut tidak menjelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Dahulu juga sering terjadi banjir tetapi dapat diperkirakan, yaitu ketika akhir atau awal tahun karena hujan. Namun, situasi saat ini berbeda dan tidak dapat diprediksi.

Letak geografis yang bersebelahan dengan pantai merupakan berkah sekaligus ancaman. Lokasi ini dipenuhi hutan bakau, yaitu pada huruf D (lihat Gambar 4.3) yang telah lama ada. Seorang perangkat desa menceritakan bahwa dahulu hutan bakau memiliki vegetasi yang baik. Beliau menyaksikan sendiri pengurangan kualitas dan kuantitas hutan bakau tersebut. Upaya untuk memperbaiki kualitas bakau dilakukan hampir setiap tahun. Penanaman melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak. Namun, penanaman sebagian besar gagal karena arus air kencang tidak dapat membuat bibit tanaman yang ditanam bertahan lama. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat membutuhkan inovasi penanaman bakau agar persentase keberhasilan tumbuh ketika penanaman besar.

Bersebelahan dengan tanaman bakau dibangun tambak yang luasnya hampir menyamai hutan mangrove itu sendiri (lihat Gambar 4.3). Meski pembangunan tambak dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan produk ikan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Terbukti dengan rendahnya jumlah pekerja lokal yang terlibat dalam kegiatan tersebut, bahkan kebanyakan dari mereka berasal dari Pulau Jawa. Tak hanya itu, ternyata lahan tambak tersebut berasal dari konversi lahan pertanian yang dibeli oleh seorang pengusaha asal Pontianak. Beberapa petani pun diperkirakan kehilangan mata pencahariannya karena tidak terpilih sebagai pekerja di usaha tambak tersebut.

Tambak di desa ini dibangun dengan cara menggali lahan hingga mencapai kedalaman dua hingga empat meter. Sisa galian ditimbun di sekitar kolam sehingga ketinggian tanah di sepanjang sisi kolam bertambah beberapa meter. Perubahan aliran air yang terjadi akibat pembangunan tambak dapat membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Aliran air yang tadinya mengalir secara alami, kini terhambat dan dialihkan ke sekitar tambak termasuk lahan pertanian dan permukiman. Dampak yang muncul cukup signifikan, diantaranya rusaknya lahan pertanian di sekitar tambak serta risiko banjir yang mengancam permukiman sekitar. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan yang tepat dan terukur untuk mengatasi dampak



Foto: Yumantoko (2022)

Gambar 4.4 Tambak di Desa

yang dihasilkan oleh pembangunan tambak sehingga memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat.

Satu dusun yang berada tepat di depan kantor kepala desa yang dibatasi jalan raya Pontianak-Singkawang kini menjadi langganan banjir. Banjir sudah menjadi ancaman serius. Wilayah satu dusun yang berbatasan dengan laut terkena dampak buruk intrusi air laut. Salah seorang warga mengatakan bahwa kejadian ini intens dalam satu tahun. Saat ini kejadian banjir tidak dapat diprediksikan karena banjir juga berasal dari air laut. Adaptasi warga zaman dahulu adalah dengan meninggikan pondasi bangunan sehingga ketika memasuki akhir hingga awal tahun sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Saat ini, banyak warga yang kesulitan untuk melakukan adaptasi. Masyarakat menggunakan mesin pompa untuk mengatasi masalah banjir dan membutuhkan banyak biaya operasional.

Lahan pertanian yang dulunya produktif kini tidak dapat ditanami padi secara maksimal karena terendam air laut dan ditumbuhi rerumputan liar. Meskipun begitu, tanaman kelapa masih dapat tumbuh dengan baik di lahan tersebut. Beberapa petani yang menggantungkan hidup dari usaha pertanian padi terpaksa pindah

ke daerah yang lebih jauh dari pantai atau mencari lahan pertanian di desa lain. Warga setempat juga menyewa lahan dari penduduk di desa tetangga untuk melanjutkan aktivitas pertanian mereka. Namun, keuntungan yang didapatkan harus disisihkan untuk biaya sewa lahan dan transportasi yang cukup tinggi. Selain itu, jika pemilik lahan sewaktu-waktu mengambil kembali tanahnya maka petani penggarap akan menghadapi kesulitan dalam mencari lahan lain. Situasi ini menunjukkan betapa sulitnya kondisi bagi para petani di daerah yang terkena dampak intrusi air laut.

Tulisan di atas memberi pelajaran bahwa rusaknya lingkungan akan berdampak pada masyarakat. Rusaknya lingkungan karena masuknya air laut bisa jadi disebabkan karena rusaknya ekosistem bakau dan pembukaan tempat usaha tambak. Usaha tambak pada satu sisi menguntungkan secara ekonomi tetapi di sisi lain, daya dukung lahan menjadi tidak seimbang. Masyarakat akan mendapat kerugian banjir dan hilangnya sebagian lahan pertanian. Biaya yang dikeluarkan



Foto: Yumantoko (2022)

Gambar 4.5 Seorang ibu rumah tangga mengeluhkan air laut masuk kerumah.

penduduk untuk mengatasi dampak buruk tersebut meningkat dan mengancam masyarakat menjadi rentan terhadap kemiskinan. Kekayaan keluarga yang seharusnya untuk mencukupi kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, papan, dan sebagainya menjadi terfokus ke penanganan bencana. Kegiatan Regsosek menjadi penting dilakukan karena akan mendorong perubahan kesejahteraan melalui dukungan program pemerintah yang meringankan pengeluaran masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan akibat dampak kerusakan lingkungan. Regsosek menjadi basis data intervensi yang diharapkan mampu menjangkau secara tepat.

C. Menelisik Awal Pemahaman Proses Bisnis Registrasi

Mempawah, sebuah kabupaten di Kalimantan Barat sedang berupaya meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan data melalui Regsosek. Proses bisnis Regsosek menggambarkan strategi dalam pendataan yang lebih berkualitas. Proses tersebut sebagian besar merupakan turunan dari pusat terkait alur dan waktu pelaksanaan. Secara umum, proses bisnis Regsosek dibagi menjadi koordinasi dan konsolidasi teknis, penyiapan basis data Regsosek dan kebutuhan teknis, pengumpulan data, proses pengolahan data, forum konsultasi publik, dan penyerahan data. Dalam konteks Mempawah, penerapan Regsosek menjadi sangat penting guna mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjalankan kegiatan Regsosek, BPS membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan di daerah setempat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada bulan September, BPS Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi yang melibatkan unsur-unsur di daerah. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan melakukan koordinasi secara internal dan eksternal. Koordinasi internal melibatkan seluruh BPS di Kalimantan Barat yang ada di kabupaten dan kota. Sedangkan koordinasi eksternal dilakukan dengan pertemuan di tingkat provinsi untuk menarik dukungan

dari instansi-instansi terkait. Tidak lama berselang, setiap kota dan kabupaten juga melaksanakan kegiatan serupa di wilayah masing-masing, termasuk di Mempawah dengan melaksanakan pertemuan dengan *stakeholder* pemerintahan daerah terkait, termasuk dengan Bupati Mempawah. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Regsosek memiliki pemahaman yang sama dan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam kegiatan sosialisasi ini, BPS juga menjelaskan tujuan dan manfaat dari kegiatan Regsosek. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memperkuat dukungan dan partisipasi dari semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan demikian, diharapkan kegiatan Regsosek dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat bagi kebijakan pembangunan di daerah.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, BPS Mempawah memaparkan tujuan dan manfaat dari kegiatan Regsosek untuk memperkuat dukungan dan partisipasi dari semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Diharapkan, dengan partisipasi seluruh pihak, kegiatan Regsosek dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat bagi kebijakan pembangunan di daerah. Sebagai persiapan awal, BPS Mempawah telah melakukan pengumpulan data terkait Regsosek dengan matang melalui basis data satuan lingkungan setempat (SLS). SLS merupakan satuan terkecil dalam pendataan yang biasanya mencakup satu dusun untuk memudahkan pengelolaan data oleh petugas penanggung jawab. Selain itu, BPS Mempawah juga melakukan pengecekan terhadap peta yang akan digunakan dalam aplikasi Wilkerstat, yang menjadi penting sebagai dasar wilayah untuk fokus pengumpulan data.

Untuk mengumpulkan data, BPS Mempawah merekrut personel yang terdiri dari tenaga mitra BPS dan anggota baru yang memenuhi kriteria tertentu. Perekrutan baru dilakukan karena mitra BPS di Mempawah tidak mencukupi mengingat banyaknya penduduk yang akan didata. Anggaran Regsosek di Mempawah mencapai 2,8 miliar, dengan sebagian besar dialokasikan untuk upah PPL dan PML.

Petugas lapangan yang direkrut mencapai 430 orang dan 10 instruktur, ini menunjukkan keseriusan BPS Mempawah dalam mengumpulkan data terkait Regsosek.

Demi memastikan keakuratan data yang terkumpul, BPS Mempawah memberikan pelatihan kepada petugas terpilih agar dapat memahami pertanyaan secara mendalam dan melakukan pengumpulan data secara akurat. Pelatihan dilaksanakan di Pontianak selama dua hari. Pelaksanaan pelatihan tidak di Mempawah karena keterbatasan tempat untuk menampung banyaknya petugas sehingga harus dilaksanakan di Kota Pontianak yang banyak memiliki tempat yang memadai. Selama pelatihan, BPS Mempawah menekankan pentingnya sensitivitas terhadap kategori keluarga miskin dan tidak miskin. Namun menurut kepala BPS Mempawah, kategori tersebut masih menjadi perdebatan terutama jika diterapkan di daerah yang berbeda-beda. Materi lain yang diberikan, antara lain terkait organisasi lapangan, konsep keluarga dan penduduk, verifikasi keluarga, aplikasi Wilkerstat, tata cara wawancara, pengisian kuesioner, pendataan keluarga penduduk wilayah khusus, pemeriksaan, pengawasan lapangan, dan monitoring. Materi yang dipaparkan dalam setiap sosialisasi telah membekali petugas dengan baik.

Dalam proses perekrutan petugas lapangan, BPS Mempawah mempertimbangkan kepemilikan telepon pintar dengan sistem operasi Android. Hal ini karena terdapat aplikasi yang hanya dapat diakses melalui telepon pintar dengan sistem operasi Android untuk memasukkan data ke dalam *database* BPS. Ada cerita tentang seorang petugas di Kuala Secapah yang membeli *handphone* baru untuk menjadi petugas pencatat BPS, semangat tinggi para petugas dalam menjalankan tugas mereka patut diapresiasi. Dengan persiapan yang matang, pengumpulan data terkait Regsosek di Mempawah diharapkan dapat berjalan lancar dan akurat sehingga memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Tahapan persiapan pengumpulan data meliputi pengadaan lembar kuesioner yang sesuai dengan kebutuhan. BPS juga harus mempersiapkan logistik yang dibutuhkan dalam pengumpulan data,

termasuk memastikan bahwa logistik memenuhi standar kualitas yang baik dan mencakup wilayah yang luas dan memadai untuk melakukan pengumpulan data secara efektif. Pada tahap pengumpulan data, pelaksanaannya di Mempawah mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh pusat dan petugas di lapangan berkoordinasi dengan perangkat desa, seperti dusun, untuk mencocokkan data tentang warga yang miskin dan tidak, serta menanyakan lokasi keberadaan rumah atas nama tertentu untuk menghindari kesalahan pencatatan. Petugas pendata juga melakukan pencatatan dengan cara yang sopan dan ramah terhadap tuan rumah, seperti meminta izin terlebih dahulu sebelum memfoto kondisi rumah. Petugas juga mengumpulkan data dari tempat khusus, misalnya barak militer dan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Tempat khusus lain yang dijangkau oleh petugas di Mempawah, yaitu ketika malam Regsosek dilaksanakan pada 29 Oktober 2022 bagi awak kapal pada kapal yang berbendera Indonesia dan tunawisma.

Setelah data terkumpul dari petugas di lapangan, data tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan akurasi. Jika ada kesalahan dalam pengumpulan data, petugas diminta untuk mengumpulkan data kembali. Jika terjadi masalah, PPL harus segera melaporkan kepada atasan mereka, yaitu PML. Di Mempawah, kecepatan pencatatan oleh PPL dipengaruhi oleh lokasi pencatatan. Untuk daerah perkotaan lebih sulit, pencatatan mungkin memakan waktu lebih lama. Namun, di daerah pedesaan, pencatatan dapat dilakukan lebih cepat. Di BPS Mempawah, seorang petugas BPS bertugas mencatat hingga maksimal 250 orang. Satu kali wawancara dengan responden memakan waktu 15 hingga 30 menit, tergantung pada pemahaman responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang digunakan adalah baku yang telah ditetapkan oleh BPS pusat. Namun, ada beberapa pertanyaan yang perlu diterjemahkan ke dalam bahasa lokal karena ada warga, terutama yang berusia tua, kurang memahami pertanyaan tersebut.

Tahap pengolahan data, forum konsultasi publik, dan pengambilan data dilakukan setelah data dikumpulkan. Untuk informasi terkait

ketiga proses tersebut belum banyak diketahui karena waktu survei Tim BRIN sudah lewat. Namun, seorang pegawai BPS Mempawah mengatakan untuk input data dari hasil survei dilakukan oleh tenaga yang berbeda dari petugas pengumpulan data. Petugas pengumpulan data dapat mendaftarkan diri kembali untuk menjadi tenaga input data dan kesempatan diterima lebih besar. Proses selanjutnya, yaitu Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dilakukan sebagai metode untuk memvalidasi data yang sudah ada. Satuan terkecil untuk konsultasi publik adalah SLS. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan umpan balik dari masyarakat terkait data yang telah dikumpulkan dan diolah. Pelaksanaan kegiatan FKP dilakukan dengan cara membentuk diskusi terfokus dengan unsur para pihak berkepentingan, seperti camat, kepala desa, dan masyarakat yang dipandu oleh fasilitator yang merupakan PPL/PML.

Tahapan terakhir pelaksanaan Regsosek adalah finalisasi, yang meliputi penyerahan data yang dilaksanakan pada 2023. Pada tahap ini diserahkan hasil pengolahan data kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik itu instansi pemerintah, swasta, atau masyarakat umum. Beberapa hal yang menantang bagi pelaksanaan Regsosek ialah tenggat waktu yang dipandang sempit mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, menyebabkan persiapan yang kurang matang. Kepala BPS Mempawah pernah mengatakan bahwa pernah meloloskan petugas yang seharusnya tidak diterima. Ketika diadakan pelatihan selama dua hari, salah seorang peserta didapati sedang mengadakan pesta minuman keras di tempat tidur. Kejadian tersebut diketahui ketika pegawai hotel melakukan pembersihan tempat tidur. Setelah mendapat laporan dari pihak hotel, akhirnya peserta pelatihan tersebut dikeluarkan. Kejadian tersebut merupakan salah satu peristiwa yang menjadi pembelajaran bagi pelaksana kegiatan Regsosek. Dengan mengikuti proses bisnis Regsosek secara sistematis dan terintegrasi, diharapkan BPS Kabupaten Mempawah dapat menghasilkan data statistik yang akurat dan berkualitas. Data ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di berbagai

bidang, seperti pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya.

D. Antara Nilai Positif dan Tantangan Mendata Regsosek

Pelaksanaan kegiatan Regsosek dilakukan dengan bertanya langsung ke setiap rumah tangga. Data yang terkumpul digunakan sebagai pengambil kebijakan terhadap program-program kesejahteraan sosial. Namun, untuk mendapatkan data yang valid dan detail itu tidak mudah. Cerita dari pihak yang terlibat memberi warna dalam sebuah pengumpulan data Regsosek. Proses pengumpulan data sangat dinamis dan perlu strategi untuk setiap tantangan.

Salah seorang pegawai BPS provinsi menceritakan suka duka dalam pengumpulan data lapangan. Petugas menyadari Regsosek sebagai tugas yang penting sebagai bagian untuk mendorong kemajuan negara. Dalam pelaksanaan Regsosek juga menghadapi tantangan, salah satu tantangan adalah penolakan dari warga. Meskipun jumlah penolakan warga lebih sedikit dari warga yang mau menerima, tetapi cukup menghambat petugas. Setiap wilayah memiliki karakter berbeda yang penanganannya juga berbeda. Jika dibedakan antara kota dan desa, pegawai BPS akan mengatakan bahwa pendataan di kota memiliki tingkat kesulitan yang lebih besar jika dibanding di desa.

Kota yang masyarakatnya heterogen memiliki kecenderungan kesulitan melakukan pendataan. Penduduk kota memiliki kesibukan sehingga tidak mudah ditemui. Ada cerita dari pegawai BPS bahwa terdapat warga yang tinggal di perbatasan kota provinsi dan kabupaten sering menolak ketika ada pendataan. Penduduk kota Pontianak (KTP Pontianak) yang menetap di Kabupaten Kubu Raya banyak memilih tidak bersedia didata petugas dari kabupaten. Warga ini khawatir pendataan itu berdampak pada statusnya sebagai pemegang KTP Kota Pontianak. Menurut pegawai BPS, hal ini terjadi karena anggapan

bahwa pendataan tersebut akan berdampak berkurangnya manfaat sebagai pemegang KTP Kota Pontianak.

Kejadian lain berasal dari seorang Koseka yang pernah mendapat laporan dari PPL di Jungkat karena warga menolak untuk diwawancara. PPL tersebut menceritakan bahwa ketika berkunjung sudah sesuai prosedur dengan mengucapkan salam kepada pemilik rumah, dan bahkan salam tersebut dijawab oleh pemilik rumah itu sendiri. Namun, pemilik rumah mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan petugas. Petugas melaporkan kepada Koseka yang menjadi penanggung jawab di tingkat kecamatan untuk mengatasi hal itu. Kejadian ini menunjukkan pentingnya sosialisasi kepada warga untuk menghindari kecurigaan.

Petugas BPS Mempawah pernah mendapat penolakan pendataan dari ketua RT. Hal ini terjadi karena kesalahpahaman terkait kegiatan Regsosek. Terkadang masyarakat curiga karena seringnya pendataan tetapi bantuan tidak kunjung datang. Selain itu, kepercayaan terhadap data yang terkumpul menjadi catatan penting bagi penyelenggara agar manajemen data dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga efektifitasnya bertambah baik. Banyak instansi mencari data ke desa-desa untuk tujuan tertentu. Warga merasa data yang sudah ada tidak dimanfaatkan secara maksimal. Petugas berusaha mengatasi berbagai kondisi lapangan. Ketika PPL mendapat kesulitan, PPL meminta bantuan PML. PML umumnya menghubungi perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk meminta dukungan. PML terkadang juga meminta bantuan kepada Koseka secara langsung untuk menyelesaikan masalah.

Tantangan dalam pendataan juga datang dari alam. Petugas melakukan pendataan dalam kondisi banjir dan menyeberang sungai untuk mengunjungi pulau tertentu. Petugas mencoba untuk menghadapi satu persatu tantangan agar tugas segera diselesaikan. Beberapa wilayah di Kalimantan Barat ketika sedang dilakukan pendataan Regsosek mengalami banjir. Banjir terkadang dapat berasal dari air hujan maupun pasang laut. Ada juga cerita dari petugas



Foto: BPS Kalbar (2022)

Gambar 4.6 Tantangan Petugas dalam Mendata

dimana kapal yang digunakan untuk menuju lokasi pendataan terbalik ketika akan menuju ke wilayah tertentu.

Bagi petugas yang pertama kali terlibat, Regsosek memiliki makna mendalam karena memberi pengalaman berharga. Salah seorang PPL di Desa Kuala Secapah mengungkapkan bahwa ketika bergabung dengan Regsosek memperoleh pengalaman berharga terutama untuk belajar menghadapi banyak orang. Petugas mengungkapkan bahwa bertemu dengan orang baru memberi pelajaran dalam meningkatkan kapasitas, seperti kemampuan komunikasi. Ketika di lapangan banyak pelajaran yang dapat diambil untuk membangun karakter individu karena dilapangan akan berhadapan dengan banyak karakter berbeda. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat agar dengan kerelaan didata membutuhkan jam terbang yang tinggi.

Banyak laporan dari petugas lapangan yang kesulitan menghadapi masyarakat secara langsung. Beberapa warga sulit diajak bekerja sama dalam pendataan yang menyita waktu dan pikiran. Rasa lelah dan bingung kadang muncul ketika apa yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Warga bertanya kepada PPL dan PPL merasa bukan kewenangannya untuk menjawab. PPL tersebut sering

mendapat pertanyaan seperti “mengapa sering mendata padahal sebelumnya ada pendataan, kemana data yang lama?”, ungkap beliau. Namun, pengalaman ini menjadi pelajaran yang berharga dalam menghadapi masyarakat yang memiliki karakter berbeda-beda. Hal positif yang petugas dapat setelah bergabung dengan Tim BPS ialah petugas menjadi mengenal daerahnya. Petugas yang lahir di wilayah tersebut akan menjadi lebih memahami secara mendalam kondisi warga. PPL merasa lebih mengetahui warga yang mampu dan yang perlu dibantu. Proses pendataan juga dipandang mendorong petugas untuk mengenal banyak orang sekaligus mendekatkan saudara dan tetangga yang sudah lama tidak berjumpa.

Berdasarkan keterangan petugas, umumnya warga yang didata berharap mendapat bantuan sosial. Warga memang tidak tahu mekanisme penentuan pemberian bantuan, tetapi berharap mendapatkan informasi dari pemerintah. Petugas memberikan gambaran secara umum mengenai bantuan yang ada selama ini. Menurut petugas terkadang ada warga yang menutupi informasi kesejahteraannya. Namun, salah seorang tokoh masyarakat di Desa Kuala Secapah malah mengatakan sebaliknya bahwa ada keluarga yang menolak didata petugas karena dianggap tidak mampu. Keluarga tersebut justru tersinggung karena dianggap nanti kalau di data akan dicap sebagai orang tidak mampu dan otomatis menerima bantuan sosial.

Kepala desa mengatakan kesulitan karena mengurus warga yang jumlahnya sekitar sebelas ribu jiwa dengan permasalahannya masing-masing. Kepala desa mengungkapkan suka duka menjadi kepala desa yang terkadang lebih banyak dukanya. Saat bantuan sosial marak terutama ketika pandemi, kepala desa mengaku sangat tertekan dari dua sisi, yaitu dari masyarakat dan pemerintah secara struktural. Beliau mengungkapkan bahwa banyak warga yang seharusnya tidak dapat bantuan justru mendapat bantuan atau sebaliknya. Tekanan dari struktural, yaitu kepala desa harus segera menyalurkan bantuan. Menurut kepala desa, saat ini desa menjadi lembaga yang tekanannya besar karena program-program banyak dibebankan di tingkat desa.

Kegiatan yang dahulu dilakukan di tingkat kecamatan saat ini dilakukan di tingkat desa. Pemerintah pusat menurut penuturan beliau bertindak dengan kewenangan yang besar kepada pemerintah desa dengan memberikan banyak penugasan yang intensitasnya semakin banyak. Menurut beliau, peran desa dapat ditingkatkan lebih besar karena informasi terkait kependudukan setempat berada di desa. Data yang digunakan lembaga pusat untuk berbagai kebijakan terutama kesejahteraan sosial merupakan data lama yang belum diperbarui. Perubahan kesejahteraan masyarakat dapat berlangsung cepat dalam hitungan tahun, tetapi hal tersebut tidak diikuti perubahan data di tingkat pusat secara cepat. Itulah harapan desa agar pendataan yang sekarang dilakukan dapat mengumpulkan informasi secara tepat.

E. Dukungan Kelembagaan

Pelaksana Regsosek merupakan kewenangan BPS. BPS menjadi *leading* dengan legitimasi berdasar aturan yang berlaku. Regsosek menciptakan hubungan kerja sama antar lembaga baik di level pusat, daerah, hingga desa. Peran masing-masing pihak pada tiap level memiliki tugas yang berbeda. Peran pemangku kepentingan pada level nasional berupa dukungan kebijakan dan anggaran sangat diperlukan. Peran pemangku kepentingan pada level di tingkat provinsi dan kabupaten ialah dukungan organisasi perangkat daerah dengan beragam kepentingan. Peran pemangku kepentingan pada sisi pelaksana adalah implementasi itu sendiri, yaitu penggalan data dari masyarakat secara langsung. Masyarakat juga memiliki peran dalam membantu menyelesaikan kegiatan Regsosek.

Pengorganisasian mulai dari tingkat dasar/lokal hingga tingkat atas sudah diatur terpusat. PPL merupakan petugas di lapangan yang mengumpulkan data primer dari keluarga berdasarkan satuan lingkungan setempat (SLS). Daftar nama keluarga yang akan di wawancara biasanya berada dalam satu dusun. Peran kepala dusun membantu petugas di lapangan terkait daftar warga yang tinggal di wilayah tersebut. Kepala dusun mengetahui warga yang masih menetap

dan ataupun berpindah. PPL kemudian berkoordinasi dengan kepala dusun untuk mengetahui tempat tinggal suatu keluarga. Terkadang PPL kesulitan dalam mencari warga yang sudah terdaftar karena tidak menguasai wilayah. Kejadian seperti ini banyak dialami di desa Sungai Bakau Besar Laut dan Kuala Secapah.

Ketika PPL mencari alamat suatu keluarga tetapi tidak kunjung ditemukan maka PPL mengajak kepala dusun untuk mencari rumah yang dimaksud. Hal yang dikuasai PPL ketika berada di lapangan setidaknya, yaitu berkomunikasi dengan sopan kepada warga, menerjemahkan wawancara dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, mengoperasikan aplikasi Regsosek, menguasai materi pertanyaan, menguasai tujuan Regsosek, dan sebagainya. Ada beberapa pendapat tentang metode penyebaran PPL di beberapa desa di Mempawah. Pendapat pertama adalah PPL diturunkan di daerah asalnya. PPL yang berasal dari lokasi setempat dipandang lebih mengetahui wilayah sehingga pelaksanaan pendataan akan terhindar dari permasalahan, seperti PPL yang tidak tahu rumah warga dan lainnya. Pendapat lain, yaitu PPL ditempatkan pada lokasi yang bukan asalnya. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan dalam pencatatan. Kepala BPS Mempawah pernah menemui kasus dimana penduduk dalam satu wilayah dicatat miskin agar kemudian mendapat bantuan sosial. Setelah ditelusuri, petugas pencatat ternyata memiliki hubungan darah dengan sebagian warga di daerah tersebut.

Partisipasi lembaga/perangkat desa dalam pelaksanaan pendataan tidaklah secara langsung. Kepala desa terlihat kurang memahami mengenai arti Regsosek. Kepala desa mengungkapkan bahwa saat sosialisasi beliau diwakilkan oleh perangkat desa lain. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sosialisasi Regsosek belum diketahui seluruh perangkat desa karena informasinya terbatas kepada perangkat desa yang ikut sosialisasi. Hal ini ironi jika mengutip Yuwono (2022) dimana pemutakhiran data Regsosek secara *bottom-up*, menempatkan desa sebagai ujung tombak pengelolaan data yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetapi justru partisipasi dari bawah yang masih perlu ditingkatkan.

Jejaring dan distribusi informasi dan komunikasi antara petugas yang satu dengan lainnya, antara PPL dengan PML bahkan dengan Koseka terlihat lancar dan tidak ada kendala yang berarti. Pengalaman petugas yang bersedia mengatasi masalah menjadi bukti bahwa berbagai kendala dapat dihadapi bersama. Yulianto (2022) menyatakan bahwa rangkaian koordinasi sosialisasi Regsosek dengan kementerian/ lembaga terkait dilaksanakan sebagai berikut, (i) penerbitan surat edaran untuk mendukung pendataan dan pemanfaatan Regsosek oleh Pemda hingga desa/kelurahan; (ii) sosialisasi dan edukasi Regsosek bagi masyarakat desa melalui Pendamping Desa dan forum data di tingkat desa; (iii) sosialisasi dan edukasi Regsosek bagi UMKM dan koperasi di seluruh Indonesia; (iv) sosialisasi dan edukasi Regsosek melalui kader dan petugas kesehatan sampai tingkat desa/kelurahan; (v) sosialisasi dan edukasi Regsosek bagi seluruh jajaran TNI dan POLRI, termasuk proses pengamanan pendataan dan dukungan di lokasi sulit; dan (vi) sosialisasi dan edukasi Regsosek bagi klien di LKS dan panti daerah, melalui pekerja dan pendamping sosial.

Sosialisasi kepada masyarakat secara perorangan nampaknya masih belum optimal karena saat PPL mendatangi masyarakat masih banyak yang bertanya mengenai maksud dan tujuan pendataan. Pertanyaan masyarakat, “apalagi yang akan didata, kemarin sudah didata, mengapa di data lagi?”. Banyak pula yang bertanya mengenai pendataan yang terhubung dengan bantuan. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui Regsosek dan khawatir akan mempengaruhi bantuan-bantuan yang selama ini telah diterima. Sosialisasi Regsosek sebenarnya sudah dilakukan melalui rapat koordinasi, media sosial, baliho, dan ketua RT, tetapi belum menyentuh masyarakat lokal. Saat ini, BPS membutuhkan dukungan dari banyak pihak mulai dari tingkat provinsi sampai satuan terkecil, seperti Rukun Tangga (RT). Namun, banyak dari lembaga tersebut tidak mengetahui kegiatan Regsosek. Kepala desa dan Ketua RT misalnya ada yang belum mendapat sosialisasi Regsosek. Kepala desa mengetahui Regsosek ketika ada petugas yang datang untuk mendata. Kejadian ini memperlihatkan sosialisasi Regsosek masih belum maksimal. Kesan

awal masyarakat mungkin akan curiga sebelum petugas menerangkan maksud kedatangan petugas.

Keterlibatan kelembagaan informal dalam proses pendataan secara langsung kurang terlihat karena kegiatan yang telah dilakukan hanya oleh Pegawai BPS Kabupaten Mempawah dengan mitra kerjanya saja. Keterlibatan datang dari lembaga formal, seperti dari jajaran pemerintah daerah (Satpol PP dan Dinas Sosial) dan pihak kepolisian saat pelaksanaan pendataan malam Regsosek. Dukungan yang diharapkan pada pelaksanaan Regsosek sebenarnya adalah dukungan secara berjenjang mulai dari K/L terkait dan instansi vertikal, Gubernur, Bupati dan Walikota, Camat, Kepala desa dan Lurah, dan Kepala Satuan Lingkungan Setempat (RT). PPL adalah ujung tombak proses Regsosek. PPL mendata dan memeriksa satu persatu kelengkapan hasil wawancara. Jika sudah dianggap cukup memenuhi yang dipersyaratkan, hasil wawancara diserahkan ke PML. PML membimbing PPL saat ada permasalahan di lapangan. PML juga sebagai penghubung BPS dengan pemerintah desa, misalnya sosialisasi kepada perangkat desa. PML juga harus memperkenalkan petugas PPL kepada perangkat desa.

Model pendataan Regsosek berbeda dengan model pendataan BPS sebelumnya. Salah satu perbedaan, yaitu penggunaan aplikasi telepon pintar. PPL dipersyaratkan memiliki ponsel Android dengan spesifikasi tertentu misalnya RAM minimal 4 GB. Perangkat ini berguna dalam menjalankan aplikasi *geo-tagging* untuk mencatat lokasi keberadaan rumah. Keuntungan penggunaan aplikasi untuk mengetahui posisi dan foto rumah secara jelas. Kejelasan data akan sangat membantu dalam pemberian bantuan ataupun kebijakan pemerintah. Masalah yang dialami petugas ialah sinyal internet yang tidak stabil sehingga membutuhkan waktu lebih dalam pendataan. Kepala BPS Provinsi menginginkan agar data yang terkumpul di Regsosek dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh berbagai pihak. Kekurangan dan kelebihan program yang dilakukan pemerintah perlu dievaluasi dengan memanfaatkan data Regsosek. Harapannya hasil pendataan Regsosek dapat digunakan optimal oleh para pemangku

kepentingan. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung kegiatan pendataan selanjutnya.

F. Cerita dari Pendata

Petugas pelaksana pendataan Regsosek terdiri dari Petugas Pendataan Lapangan (PPL), Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML), dan Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka). PPL mendapatkan tugas pendataan maksimal sebanyak 250 kepala keluarga, PML membawahi empat sampai tujuh PPL (maksimal 7 PPL) dan Koseka membawahi delapan PML bahkan hingga sembilan PML agar dapat mencakup satu kecamatan.

Tugas PPL adalah melakukan pendataan keluarga. Tugas PML ialah melakukan pengawasan pendataan dan pemeriksaan dokumen dan tugas Koseka memantau jalannya pendataan dan membantu memberikan solusi jika ada permasalahan. PPL di Kabupaten Pontianak mendata 77.190 kepala keluarga yang didukung oleh 311 PPL, 80 PML, dan 12 Koseka (Mariani, 2022). PML dan PPL direkrut melalui seleksi sebanyak tiga tahap, yang meliputi seleksi administrasi, tertulis, dan wawancara. Kemudian, Koseka sebagai pegawai yang ditunjuk oleh Kepala BPS Kabupaten Mempawah. Ada salah satu PPL berpendidikan Sarjana Strata 1 (S1), berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa dia berasal dari keluarga yang mampu. PPL tersebut adalah perempuan yang belum menikah dan masih tinggal bersama orang tuanya. Keikutsertaan dalam pendataan Regsosek berawal dari info Instagram Kantor BPS Kabupaten Mempawah yang menyatakan adanya rekrutmen PPL untuk Regsosek.

Pendaftaran dilaksanakan secara *online*, yang lulus diumumkan juga di Instagram BPS, kemudian diumumkan untuk jadwal wawancara. Pendaftar yang lulus tes kemudian mengikuti pelatihan selama tiga hari. Setelah pelatihan, petugas mengambil berkas yang terkait untuk melaksanakan pendataan Regsosek ke lapangan. Salah satu responden (PML) bercerita bahwa pekerjaannya selain

sebagai petugas pendata ialah operator di desa dan berwiraswasta. Pendidikannya SMK Otomotif berusia 42 tahun berjenis kelamin laki-laki, sudah berkeluarga dan mempunyai dua orang anak. PML tersebut merupakan orang desa setempat, penduduk di wilayah desa yang menjadi tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan Regsosek relatif lancar karena banyak responden yang mengenalnya.

Pendataan yang dilakukan melalui wawancara oleh PPL berjalan lancar dan PPL dapat menerangkan dengan baik setiap pertanyaan dalam kuesioner yang kurang dipahami responden. Wawancara dilakukan oleh PPL dengan sopan, terkhusus saat menanyakan hal yang bersifat pribadi dan sensitif didahului dengan kata maaf. Suasana wawancara terlihat akrab dan santai sambil bercanda, terutama pada saat pertanyaan-pertanyaan terakhir. Namun, kadang-kadang responden terlihat serius saat menjawab pertanyaan-pertanyaan. PPL berpakaian rapi dan sopan memulai wawancara dengan menanyakan *fotocopy* kartu keluarga dan ada yang kemudian memintanya. Setelah pengisian kuesioner selesai PPL meminta izin untuk mengambil gambar foto rumah responden bagian depan.

Berdasarkan pengalaman dalam pendataan Regsosek, banyak pengalaman dan pengetahuan yang didapat oleh petugas. Petugas menjadi tahu kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerahnya dan menjadi lebih simpati kepada masyarakat. PPL baru menyadari ternyata masih terdapat warga yang miskin di lingkungannya. PPL menyatakan bahwa pertanyaan dalam kuesioner tidak semua mudah dipahami oleh responden. Pada pertanyaan tertentu harus diterangkan dengan bahasa lokal agar mudah dimengerti oleh responden. Responden dengan tingkat pendidikannya rendah harus dijelaskan dengan baik maksud pertanyaan-pertanyaan yang berimplikasi pada waktu.

Pelaksana Regsosek memahami dengan baik tugas dan tanggung jawab selama Regsosek. PPL pun memahami tugasnya sebagai pendata lapangan yang menghadapi berbagai situasi sosial. PML di lain sisi turut membantu PPL dengan berkomunikasi dengan kepala desa sebagai bentuk pemberitahuan dan meminta izin untuk menelusuri

desa. PML mengampu empat PPL dan juga terlibat untuk memeriksa dan menyusun kode data. Selanjutnya, Koseka sebagai koordinator kecamatan yang membawahi delapan PML bertugas membangun komunikasi dengan pemerintah setempat, salah satunya kantor kecamatan. Koseka berkunjung untuk memberikan informasi dan meminta izin terkait Regsosek. Koseka kemudian bertugas mengawasi pelaksanaan lapangan, kunjungan ulang, melihat legalitas data, serta melakukan komunikasi kepada PML dan PPL.

Petugas mengemukakan bahwa responden mengungkapkan fakta-fakta lapangan terkait warga penerima bantuan. Salah satu keluhan warga terkait dengan bantuan sosial yang tidak pernah diterima warga. Sementara, tetangga warga yang dianggap berkecukupan justru mendapatkan bantuan. Warga akan menyalahkan ketua RT karena bantuan tidak tepat sasaran. Kejadian pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran tidak menyurutkan warga untuk tetap berharap adanya bantuan selanjutnya. Warga berharap melalui Regsosek ini, bantuan ataupun program pemerintah akan lebih tepat sasaran.

Petugas pendata berupaya menjelaskan maksud dan tujuan Regsosek agar tidak terjadi salah paham. Penjelasan petugas juga menentukan kesediaan warga untuk menjawab pertanyaan. Tantangan selanjutnya ialah adanya warga yang sulit ditemui. Responden umumnya bekerja pada pagi hingga sore hari dan saat ditemui malam hari, mengatakan cukup lelah untuk menjawab pertanyaan petugas. Tantangan geografis juga menjadi hambatan bagi petugas pendata. Petugas perlu menggunakan transportasi air (*speedboat*) selama satu jam dengan cuaca yang kurang bersahabat. Petugas pendata pernah dikira sebagai sales yang menawarkan barang. Kelengkapan tanda pengenal sudah cukup, tetapi belum terlihat bagi warga. Adanya rompi khusus sebagai pengenal seperti sensus sebelumnya akan membantu mempermudah membangun pemahaman warga. Petugas akan lebih mudah dikenali dengan atribut khusus sebagai pendata.

Pendata berharap adanya seragam (PDH) atau topi sebagai pengenal/identitas sebagai pendata Regsosek/petugas Regsosek. *Name tag* yang ada saat ini sebaiknya lebih ditingkatkan kualitasnya agar

mudah dikenal dan tidak mudah rusak untuk pelaksanaan selama satu bulan. Petugas juga mengutarakan bahwa atribut pengenal dapat pula berupa topi, kaos, atau rompi (atribut lengkap) agar lebih dikenal oleh masyarakat dan agar masyarakat yakin terhadap petugas.

G. Cerita dari Keluarga Fokus Data

Regsosek bagi keluarga yang kurang mampu merupakan harapan agar keberadaan keluarga miskin tercatat dalam dokumen kebijakan pemerintah dan program peningkatan kesejahteraan sosial. Pendataan warga untuk kepentingan program pemerintah memang sudah sering dilakukan oleh berbagai instansi yang berbeda. Namun, dinamika di lapangan masih melewatkan warga sebagai penerima manfaat. Ketika ada keluarga miskin yang keberadaannya tidak terekam dalam data induk kesejahteraan masyarakat maka hak-haknya sebagai pihak yang berhak menerima jaminan dari pemerintah menjadi terabaikan. Sebaliknya, apabila ada suatu keluarga yang mendapatkan bagian yang bukan haknya serupa dengan ketidakadilan. Regsosek patut diapresiasi sebagai bentuk perbaikan pelayanan bagi masyarakat, terlebih bagi masyarakat prasejahtera. Ketepatan informasi dalam pencatatan dapat dimanfaatkan untuk program-program pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat rentan. Data yang valid dan sesuai realitas lapangan merupakan syarat utama dalam proses pendataan. Beberapa keluarga di desa ini sebelumnya telah menerima bantuan sosial dan menyadari pentingnya perhatian pemerintah daerah.

Salah satu responden, yaitu Ibu Umi tinggal di Desa Sejegi, Mempawah Timur. Ketika berada di halaman rumah dan berniat untuk wawancara, petugas mengucapkan salam kepada pemilik dan dipersilakan masuk. Kemudian, petugas duduk di lantai bertikar. Ibu Umi memiliki seorang anak berumur sekitar tiga tahun. Suami beliau merupakan pekerja yang kembali pada sore hari sehingga untuk urusan Regsosek Ibu Umi bersedia untuk diwawancara. Rumah Ibu Umi terlihat baru dibangun dengan cat tembok berwarna abu-abu. Ruang tamu beliau juga nampaknya baru dipasang keramik. Sementara, ruang keluarga



Foto: Yumantoko (2022)

Gambar 4.7 Suasana Pendataan

dan dapur masih menggunakan alas dari plastik. Tumpukan keramik terlihat di sudut belakang.

Beberapa pertanyaan dilontarkan oleh PPL diantaranya terkait kepemilikan benda berharga. PPL menanyakan, “Apakah ibu memiliki AC?” Ibu pemilik rumah menyatakan tidak punya. Kemudian, saat pertanyaan kepemilikan kartu jaminan kesehatan, Ibu Umi menjawab



Foto: Yumantoko (2022)

Gambar 4.8 Suasana Pendataan

memiliki kartu BPJS. Bu Umi menyatakan jumlah pengeluarannya dalam satu bulan, yaitu sekitar satu juta rupiah. Setelah melakukan wawancara, PPL melakukan *tagging* dan mengambil gambar (foto) rumah tersebut.

Selanjutnya, rumah yang didata petugas berada di pinggir kebun sawit. Dinding dan lantai rumah terbuat dari kayu (lihat Gambar 4.8). Atap rumah terbuat dari seng. Satu buah motor *sport* dan dua motor jenis bebek terlihat di dalam rumah. Halaman rumah yang berupa tanah terlihat bersih dari sampah. Pemilik rumah dan kebanyakan penduduk setempat menampung air hujan untuk kebutuhan makan dan minum. Menurut cerita penduduk lokal, mengonsumsi air hujan tanpa pengolahan yang baik dapat menyebabkan kesehatan gigi terganggu. Keluarga yang mampu dapat membeli air olahan tetapi tidak seluruh keluarga dapat mengonsumsi air minum yang dijual di pasaran.

Rumah tersebut berada disamping kebun sawit yang luasnya sekitar tiga hektar. Kebun sawit yang dikelola sudah berusia sekitar lima belas tahun dan pohonnya sudah tinggi. Keluarga ini mengelola kebun sawit yang letaknya agak jauh dari rumah seluas tiga hektar. Total luas kebun sawit yang dikelola sekitar enam hektar. Pemilik rumah bernama Bapak Zainudin bersama istri bersedia menerima petugas lapangan dengan ramah. Bapak Zainudin mengemukakan bahwa beliau belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah, seperti kartu pra kerja dan sebagainya. Beliau hanya menerima bantuan BPJS Kesehatan. Rumah dan tanah yang ditinggali merupakan kepunyaan pemilik kebun kelapa sawit yang mengamanahkan kepada Bapak Zainudin untuk menjaga lahan. Beliau pergi ke kebun untuk membersihkan rumput, memangkas daun, dan memanen ketika buah sudah mulai layak panen. Setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh petugas berhasil dijawab dengan merespon secara cepat. Pertanyaan mengenai pengeluaran misalnya, beliau menjawab cepat, yakni empat juta rupiah untuk satu bulan. Beliau juga menerangkan bahwa istri beliau turut berjualan gorengan untuk menambah pendapatan.

Selanjutnya, responden bernama Bapak Sulaiman di Desa Pasir, seorang renta yang tinggal sendiri di rumah kecil ukuran sekitar 30m². Usianya mencapai 80 tahun. Rumah beliau berada di lokasi yang cukup jauh dari rumah-rumah tetangganya. Bapak Sulaiman sedang duduk-duduk diteras rumah saat petugas menghampiri. Kemampuan fisiknya sudah sangat lemah, bahkan untuk berjalan saja beliau kesulitan. Toilet beliau juga tidak dapat digunakan. Beliau tinggal sendiri di rumahnya karena anak beliau tinggal terpisah. Anak beliau membantu dalam pembayaran listrik, pembelian gas, dan makanan. Rumah Bapak Sulaiman dikelilingi oleh pekarangan yang rumputnya sudah mulai tumbuh liar. Suasana rumahnya gelap karena lampu penerangan tidak memadai, bahkan lampu dapurnya sudah lama mati. Tetangga beliau banyak yang ingin membantu, tetapi beliau terkadang menolak. Beliau pernah mengenyam sekolah SR (Sekolah Rakyat) di waktu mudanya. Petugas menanyakan KTP beliau dan yang ditunjukkan beliau adalah KTP yang diterbitkan tahun 2000 (KTP model lama). Beliau sebetulnya sudah sulit diajak berkomunikasi dengan baik karena pendengaran mulai berkurang. Ketika ada orang yang ingin mengajak berbicara harus dengan volume suara yang keras. Bapak Sulaiman menjadi bagian prioritas yang dianggap tidak mampu. Petugas kemudian memberi tanda lokasi dan mengambil gambar rumah untuk dimasukkan ke *database*.

Cerita dari Ibu Umi, Bapak Zainudin, dan Bapak Sulaiman memberi gambaran pentingnya proses pendataan Regsosek. Ada beberapa yang menjadi perhatian dalam pendataan tersebut, yaitu terkait kedalaman untuk menghasilkan data yang benar-benar akurat. Validitas data yang diperoleh akan mengungkap kondisi yang sebenarnya. Ketika data yang diperoleh valid dan sesuai fakta yang sesungguhnya maka warga yang kaya akan terdata sebagai orang mampu, dan warga yang miskin akan terdata sebagai kategori miskin. Oleh karenanya, proses menggali data dari lapangan adalah bagian penting dalam Regsosek. Beberapa responden menjawab pertanyaan petugas dengan cepat sehingga perlu diklarifikasi kembali data yang didapatkan oleh PPL. Saat petugas menanyakan kondisi kesehatan,

Bapak Zainudin mengatakan bahwa seluruh anggota keluarga beliau sehat-sehat. Namun, ketika ditelusuri lebih ternyata istri beliau pernah menderita penyakit asma. Berkaitan dengan pengeluaran, kepala keluarga menjawab sekitar empat juta, tetapi tidak ditanyakan pendapatan seluruh anggota kepala keluarga termasuk istri beliau yang berdagang. Petugas pendata diharapkan mengumpulkan informasi sedetail mungkin.

Dalam menggali data, peran PPL sangat penting. PPL dituntut untuk kreatif dalam mendapatkan data dari bermacam karakter keluarga. Keragaman latar belakang keluarga yang didata menjadi tantangan bagi petugas lapangan. Pendekatan yang tepat dapat mempercepat penggalan data dalam Regsosek. PPL menceritakan ada salah satu keluarga yang kesulitan dalam memahami pertanyaan dari kuesioner.

“Itu kan kadang ada pertanyaan apa punya *septic tank*, saya harus jelaskan apa itu *septic tank*, terus saya menjelaskan gorong-gorong. Bahasa sini gorong-gorong atau pakai tempayan dikubur itu sama dengan tempat MCK. Kadang saya menjelaskan *septic tank* itu apa. Terus NPWP terkadang mereka tidak tahu itu. Kita juga harus pandai menyederhanakan kata-kata, agar mudah ditangkap.” (Wawancara PPL Desa Pasir, 4 November 2022)

Ada juga cerita dari PPL yang ditemui di Desa Kuala Secapah dalam mengumpulkan data menggunakan pendekatan kekeluargaan.

“Ketika mengucapkan salam dan dipersilahkan duduk kemudian menjelaskan tentang maksud kedatangan. Namun pemilik rumah berbisik-bisik dengan keluarganya menggunakan bahasa Madura yang intinya penuh kecurigaan pada kita sebagai petugas dan saya khawatir tidak diterima. Saya paham bisik-bisik itu karena saya juga memiliki darah Madura dari garis Ibu. Kemudian saya menggunakan bahasa Madura. Mendengar saya berbahasa Madura, tuan rumah kemudian malah curhat-curhat pada saya.

Dengan begitu informasi mudah didapat.” (Wawancara PPL, 3 November 2022)

Penggunaan unsur-unsur lokal dalam pencarian data memiliki keefektifan disamping dengan cara-cara biasa. Hal ini perlu ditekankan untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Kebenaran informasi yang diperoleh dalam mendata menentukan efektivitas penggunaan data dalam berbagai kebijakan dikemudian hari.

H. Penutup

Proses Regsosek memiliki makna bagi seluruh pihak mulai dari masyarakat hingga lembaga pemerintah. BPS mengerahkan berbagai sumber daya untuk mendukung Regsosek di daerah. Hambatan dan kendala dapat diatasi dan menunjukkan bagaimana para pihak turut berkontribusi dalam makna pengabdian untuk negeri. Pelaksana pendataan menekankan pentingnya pemanfaatan data untuk merangkul seluruh masyarakat terkhusus masyarakat yang masih ada dalam kategori prasejahtera. Regsosek di Kabupaten Mempawah juga telah menunjukkan penggunaan teknologi terkini dalam proses pencatatan. Hal ini sekaligus menepis anggapan bahwa lembaga negara kaku dan kurang mampu mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah dan pemangku kepentingan lain harus terus berinvestasi dalam inisiatif serupa, serta mendukung upaya untuk meningkatkan pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih berkelanjutan, khususnya di Mempawah. Sangat penting untuk memastikan data yang sudah terkumpul agar dapat diolah sesuai kebutuhan masyarakat di Mempawah sehingga nantinya akan menghasilkan data yang mendekati keadaan asli masyarakat setempat. Selanjutnya, lembaga terkait perlu berkoordinasi agar data Regsosek membantu dalam program yang khusus di Mempawah.

Regsosek menjadi harapan untuk dimulainya berbagai perbaikan program dan kebijakan pemerintah. Pelaksanaan Regsosek dipandang akan lebih baik apabila tersedia lokasi waktu yang lebih. Tantangan

yang dihadapi petugas lapangan juga perlu menjadi perhatian untuk kegiatan pendataan selanjutnya. Selain itu, penghargaan pada kondisi yang beragam dari masyarakat membawa proses regosek semakin berjalan baik. Pengalaman pendataan Regsosek di Kalimantan Barat merupakan salah satu potret yang menggambarkan situasi masyarakat yang hidup jauh dari pusat pertumbuhan. Isu kebutuhan pangan, sanitasi, air minum layak, ketersediaan pekerjaan, dan lingkungan yang sehat patut menjadi perhatian pemerintah selain isu pemberian bantuan. Hal ini dapat dicapai melalui kerja sama berkelanjutan dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan, serta integrasi data Regsosek BPS ke dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang lebih luas di tingkat daerah dan nasional.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2022, September). *Penjelasan umum pendataan awal registrasi sosial ekonomi* [Presentasi]. Pelatihan Regsosek, Pontianak.
- Google. (t.t.). [Lokasi Kabupaten Mempawah]. Diakses pada 27 November, 2022, dari <https://goo.gl/maps/ZeIDEhwhar3Ap8nx6>
- Google. (t.t.) [Lokasi Desa Sungai Bakau Besar Laut]. Diakses pada 30 Nvember, 2022, dari <https://www.google.com/maps/place/Sungai+Bakau+Besar+Laut,+Sungai+Pinyuh,+Mempawah+Regency,+West+Kalimantan>
- Hartono, A. (2022, 5 September). *Kolaborasi bersama untuk registrasi sosial ekonomi 2022* [Presentasi]. Rateknas Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022, Bekasi.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (t.t.). Gambaran umum aspek geografis Kalimantan Barat. Diakses pada 30 November, 2022, dari <https://kalbarprov.go.id/page/geografis>
- Mariani, S. (2022). *Pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dalam pembangunan desa* [Presentasi]. Bahan Paparan Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat.

- Yulianto, M. W. (2022). *Pendataan awal registrasi sosial ekonomi: Satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat kolaborasi bersama untuk registrasi sosial ekonomi 2022* [Presentasi]. Pertemuan Rakorda BPS Kabupaten Mempawah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mempawah Mempawah, 20 September 2022.
- Yuwono, M. (2022, 14 September). Pendataan awal registrasi sosial ekonomi: Satu data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat [presentasi makalah]. Webinar Nasional Sosialisasi Registrasi Sosial Ekonomi.